

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki serangkaian keunggulan geografis yang signifikan, salah satunya adalah luasnya wilayah perairan. Zona maritim Indonesia yang membentang luas ini menyimpan berbagai potensi dan peluang. Sebagai negara maritim, tentunya Indonesia sangat menekankan pembangunan berkelanjutan (Susilowati, 2019). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia secara seimbang untuk jangka panjang. Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan modernisasi, demi tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini, tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka (Marliana et al., 2013).

Pembangunan berkelanjutan menganut gagasan bahwa kemajuan saat ini harus dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial generasi mendatang – baik dari sisi ekonomi, sosial (kesehatan dan pendidikan), maupun lingkungan. Konsep ini sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan mereka.

Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir bertujuan untuk menyelaraskan pola dan laju pembangunan dengan kemampuan lingkungan, memastikan bahwa permintaan terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui batas suplai. Jumlah dan kualitas permintaan ini sendiri ditentukan oleh populasi dan tingkat kesejahteraan mereka. Dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya, konsep ini mensyaratkan bahwa keuntungan dari pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir wajib diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Ini esensial untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Prinsip ini sangat mendasar bagi negara berkembang seperti Indonesia, mengingat banyak degradasi lingkungan pesisir—misalnya penambangan karang, penebangan mangrove, pengerukan pasir, dan pengeboman ikan—justru dipicu oleh kemiskinan dan kurangnya edukasi dari pihak-pihak yang terlibat (Sompotan, 2016).

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya ini terbukti positif mendukung keberlanjutan pembangunan. Dengan menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir, kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk saat ini maupun generasi mendatang (Hapsoro & Bangun, 2020).

Wilayah pesisir menyimpan potensi sumber daya alam dan pengembangan yang sangat berharga. Di dalamnya terkandung kekayaan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, serta beragam sumber daya hayati dan non-hayati beserta plasma nutfah. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekayaan luar biasa ini wajib dikelola dan dimanfaatkan secara terencana, selaras, seimbang, dan bertanggung jawab, dengan prioritas pada kelestarian lingkungan (Marliana dkk., 2013).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang optimal. Pembangunan sendiri pada dasarnya adalah upaya sadar manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Nurmatias, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir secara umum didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Karakteristik utamanya adalah perubahan yang terjadi di sana dipengaruhi langsung oleh interaksi darat dan laut (Yonvitner dkk., 2016). Wilayah pesisir sering dipandang sebagai penghasil sumber daya alam melimpah, berkat transisi antara daratan dan lautan yang menciptakan ekosistem beragam. Keberagaman ini pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomi dan produktivitas masyarakat penghuninya. Secara historis, pesisir Indonesia telah memainkan peran sentral dalam membentuk peradaban modern pribumi, berfungsi sebagai gerbang utama kedatangan penjelajah yang memanfaatkan laut sebagai jalur alami.

Wilayah pesisir merupakan area multifungsi, dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian, dan pariwisata (Pahleviannur dkk., 2020). Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan sumber daya pesisir secara terintegrasi sangat penting, dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keberlanjutan sosial (sustainable society) (Wardhana, 2020).

Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir mensyaratkan integrasi tiga tujuan utama: pembangunan yang ramah lingkungan, serta kegiatan ekonomi yang menguntungkan, menyejahterakan, dan memakmurkan masyarakat secara adil dan berkelanjutan hingga generasi mendatang (Sompotan, 2016). Ini berarti pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran harus selalu sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Pada dasarnya, kendala pengelolaan pesisir di Indonesia berakar pada isu manajerial dan teknis yang berasal dari interaksi darat dan laut. Kurangnya integrasi wilayah pesisir, ditambah dengan keterkaitannya pada aktivitas industri, seringkali menyebabkan program

pembangunan tidak berjalan sesuai rencana strategis yang sudah ada dan melibatkan pemangku kepentingan. Program yang menyimpang dari rencana semestinya ini berakibat pada koordinasi yang buruk dan memicu berbagai masalah. Berbagai kelemahan manajemen turut berkontribusi, seperti: kurangnya kompetensi dalam manajemen pesisir dan basis data, ego sektoral, penegakan hukum yang lemah, komitmen rendah, keterbatasan pendanaan dan staf, minimnya integrasi antar sektor, ketiadaan perencanaan pesisir dan laut, serta kerangka hukum yang lemah. Selain itu, riset ilmiah seringkali tidak dioptimalkan sebagai dasar pengambilan keputusan (Jamika dkk., 2023).

Faktanya, pengelolaan wilayah pesisir kerap mengabaikan prinsip-prinsip manajemen lingkungan yang baik, yaitu: partisipasi, penegakan, transparansi, kesetaraan, responsivitas kekuasaan, visi ke depan, akuntabilitas, kontrol, serta efektivitas, efisiensi, dan kompetensi. Akibat dari kelemahan ini, pengelolaan wilayah pesisir belum optimal hingga batas 12 mil laut. Potensi besar seperti wisata, perikanan, dan mineral belum dimanfaatkan secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mirisnya, kualitas lingkungan pesisir dan laut justru kian memburuk setiap tahun (Jamika dkk., 2023).

Wilayah pesisir merupakan asset strategis yang memegang peran krusial dalam pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial budaya suatu daerah. Sebagai wilayah transisi antara daratan dan lautan, Kawasan pesisir menyediakan sumberdaya alam yang melimpah seperti perikanan, pariwisata bahari, potensi energi terbarukan. Namun disisi lain wilayah ini rentan degradasi lingkungan, bencana alam serta konflik pemanfaatan ruang. Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir menjadi suatu keharusan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi, kelestarian ekosistem dan keadilan sosial bagi masyarakat untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Kabupaten sinjai yang terletak di pesisir timur provinsi Sulawesi selatan yang memiliki garis pantai $\pm 31\text{km}$ yang membentang dari kecamatan sinjai timur hingga tellulimpoe. Wilayah pesisir memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi local terutama melalui sector perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari. Selain itu ekosistem pesisirnya yang terdiri dari mangrove, terumbu karang dan padang lamun berperan penting sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, benteng alami dari abrasi dan gelombang tinggi.

Potensi besar ini dibarengi oleh tantangan kompleks seperti degradasi lingkungan yaitu, abrasi pantai, kerusakan karang penyusutan luas hutan mangrove akibat alih fungsi lahan dan pencemaran limbah. Kerentanan bencana di wilayah pesisir sinjai rawan terhadap bencana seperti banjir rob, gelombang tinggi dan perubahan iklim.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah pesisir sinjai ini cenderung belum sepenuhnya berkelanjutan, ditandai dengan pendekatan sektoral, kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya pertimbangan daya dukung lingkungan.

Wilayah pesisir Kabupaten Sinjai menghadapi sejumlah masalah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Berangkat dari uraian di atas, fakta lapangan yang ditemukan, serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Sinjai, peneliti tertarik untuk mengkaji "Strategi Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir di Kabupaten Sinjai".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimanakah pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah strategi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Sinjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian meliputi:

1. Mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Sinjai
2. Merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir Kabupaten Sinjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki 3 manfaat, yang meliputi:

1. Teoritis: Menambah literatur tentang Pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir.
2. Praktis: Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan Pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir.
3. Sosial: Mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Pembangunan berkelanjutan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Rahadian, 2016). Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Laporan Brundtland (1987), yang menekankan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial (Maulana dkk., 2024). Untuk wilayah pesisir, ini berarti mengelola sumber daya alam sedemikian rupa sehingga mendukung ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem yang ada.

Menurut Wheeler (2004), pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga internasional (Buana dkk., 2024). Dengan demikian, penerapan strategi ekonomi biru dapat menjadi bagian integral dari pendekatan tersebut, mendukung pengelolaan pesisir melalui pemanfaatan potensi alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dalam mengelola sumber daya, mengarahkan investasi, mendorong inovasi teknologi, dan menata ulang kelembagaan. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap potensi saat ini dan di masa depan, demi memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Intinya, ini adalah transformasi bertahap pada kerangka sosial, ekonomi, dan politik yang ada, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingan mereka hari ini, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menjadi fokus para ahli. Meski demikian, istilah "keberlanjutan" (sustainability) baru populer beberapa dekade belakangan, meskipun perhatian terhadap kelestarian lingkungan sudah ada sejak pandangan Malthus pada tahun 1798 (Suharyani & Djumarno, 2023).

Inti dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan berkelanjutan secara khusus berfokus pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan potensi generasi mendatang. Demi mencapai sasaran ini, empat pilar strategi menjadi krusial: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, dan integrasi, yang harus diterapkan dengan pendekatan ideal dan perspektif jangka panjang (Yusrie dkk., 2021). Konsep pembangunan berkelanjutan ini mencakup berbagai spektrum kehidupan, termasuk keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan kerangka kerja yang terintegrasi dan terdefinisi dengan baik agar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Contoh konkretnya terlihat di wilayah pesisir seperti Belawan, di mana program pembangunan berkelanjutan bisa berupa proyek restorasi *mangrove*, penguatan tanggul, serta edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat (Sigalingging dkk., 2025).

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh komitmen jangka panjang dan kecukupan alokasi sumber daya untuk mendukung kebijakan yang ada, demikian disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). Ini berarti koordinasi yang erat antarpihak sangat diperlukan demi mewujudkan program yang efektif dalam memitigasi bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan, serta meminimalkan potensi kerugian akibat perubahan iklim (Bappenas, 2020). Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Bappenas, 2022).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi dan komunikasi intensif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat lokal, guna memastikan transisi yang mulus. Salah satu sektor prioritas dalam pembangunan berkelanjutan adalah sektor pesisir laut (Jamalianuri dkk., 2021; Falatehan dkk., 2025).

Berdasarkan Laporan Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pencapaian kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata (Nasution dkk., 2024). Tujuannya adalah memastikan kualitas hidup yang baik bagi seluruh umat manusia secara

global, sembari mengurangi ketimpangan dan dampak negatif lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan harmonisasi antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Widyawati, 2019).

2.1.1 Pilar-Pilar Pembangunan Berkelanjutan

- a. **Pilar Ekonomi:** Berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang efisien, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan investasi yang mendukung keberlanjutan. Pendekatan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan, seperti ekonomi biru dan hijau, menjadi krusial.
- b. **Pilar Sosial:** Berupaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong keadilan sosial. Ini tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi manfaat yang merata, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia.
- c. **Pilar Lingkungan:** Berfokus pada perlindungan ekosistem dan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan harus menjaga kualitas lingkungan dan meminimalkan dampak negatif seperti deforestasi, polusi, serta degradasi tanah dan laut. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan konservasi alam adalah bagian integralnya.

2.1.2 Peran Pesisir dalam Pembangunan Berkelanjutan

Wilayah pesisir secara global sangat vital bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, sektor pesisir dan laut berkontribusi besar pada ekonomi melalui perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Namun, seringkali pengelolaan wilayah pesisir terabaikan, berisiko merusak ekosistem dan berdampak negatif pada kehidupan manusia serta ekonomi.

2.1.3 Faktor Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir

Menurut Kharirunnisa dkk. (2024), pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir harus memperhatikan beberapa faktor penting:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir yang Berkelanjutan: Sumber daya alam pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan berkelanjutan akan menjaga fungsi ekologis dan mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan, seperti perikanan berkelanjutan dan ekowisata.
- b. Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim: Wilayah pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim (misalnya kenaikan permukaan air laut dan badai). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan berkelanjutan harus mencakup strategi mitigasi untuk mengurangi dampak dan strategi adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir adalah memberdayakan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam pesisir. Pembangunan yang inklusif dan berbasis masyarakat akan memastikan manfaat ekonomi dan sosial dari sektor pesisir dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berlandaskan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya (Subagiyo dkk., 2016):

1. Prinsip Ekologi: Pembangunan harus menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, tanpa merusak lingkungan sebagai "tabungan" bagi generasi mendatang.
2. Prinsip Ekonomi: Pembangunan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa merusak lingkungan, serta mendistribusikan kekayaan sumber daya secara adil.
3. Prinsip Sosial: Pembangunan harus menjamin kesejahteraan sosial dengan memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
4. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Pembangunan harus menggunakan sumber daya secara bijak dan efisien untuk mencapai manfaat optimal dalam jangka panjang.

5. Prinsip Partisipasi Masyarakat: Pembangunan harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
6. Prinsip Berwawasan Jangka Panjang: Keputusan pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
7. Prinsip Kemandirian: Pembangunan harus mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

2.3 Dampak Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan memiliki dampak yang bisa dilihat dari beberapa aspek:

1. Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatif seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Namun, jika tidak diterapkan dengan benar, justru bisa merusak lingkungan.

2. Ekonomi

Ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung ekonomi lokal. Meskipun begitu, pembangunan berkelanjutan juga menuntut investasi besar pada infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

3. Sosial Budaya

Pembangunan berkelanjutan berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan mendorong keadilan sosial. Namun, ada kemungkinan juga memicu perubahan sosial dan budaya yang tidak diinginkan (Herlina & Supriyanti, 2021).

2.4 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah zona transisi yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas daratan dan lautan. Daerah-daerah ini memiliki keragaman sumber daya alam dan ekosistem yang kaya, termasuk mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan pantai. Ekosistem di wilayah pesisir menawarkan sumber daya lingkungan yang sangat bernilai, baik secara ekonomi maupun ekologis (Pahleviannur et al., 2020).

Wilayah pesisir adalah area pertemuan unik antara laut dan daratan, di mana keduanya saling memengaruhi secara timbal balik, baik dari aspek biogeofisik maupun sosial ekonomi. Karakteristik khas zona ini terbentuk dari interaksi antara proses-proses yang terjadi di darat dan di laut. Melihat ke darat, wilayah pesisir mencakup daratan (baik yang kering maupun terendam air) yang masih terasa pengaruhnya dari laut, seperti pasang surut, hembusan angin laut, dan intrusi air asin. Sementara itu, ke arah laut, wilayah pesisir meliputi

bagian perairan yang dipengaruhi oleh proses alami dari darat (contohnya sedimentasi dan aliran air tawar), serta dampak dari aktivitas manusia di darat seperti deforestasi dan polusi (Fitri, 2021).

Pengelolaan wilayah pesisir adalah serangkaian usaha untuk melestarikan dan mengatur sumber daya alam di sepanjang garis pantai, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Wilayah pesisir sendiri memegang peranan krusial, baik sebagai habitat ekologis bagi beragam spesies laut, maupun sebagai penopang ekonomi bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya pesisir, seperti dari sektor perikanan dan pariwisata (Bakti et al., 2024).

Berdasarkan penelitian (Putra et al., 2025), Indonesia kaya akan sumber daya alam pesisir yang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya termasuk perikanan berkelanjutan, budidaya laut, energi terbarukan berbasis laut, dan pariwisata pesisir. Namun, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kerusakan terumbu karang, penurunan kualitas air laut, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem pesisir.

Khususnya di Sulawesi Selatan, dengan garis pantai yang panjang dan ekosistem pesisir yang melimpah, penerapan konsep ekonomi biru dapat sangat membantu meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir. Studi oleh Sutrisno (2018) tentang pengelolaan pesisir berbasis ekosistem di Sulawesi bahkan menyarankan bahwa pendekatan ekonomi biru berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Secara garis besar, belum ada konsensus mengenai definisi tunggal untuk wilayah pesisir. Akan tetapi, Ketchum (1972) mengemukakan bahwa wilayah pesisir adalah area di mana daratan dan lautan bertemu dan saling terhubung. Ketchum (1972) juga memberikan perspektif biologis dalam mendefinisikan wilayah pesisir.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengelolaan wilayah pesisir menghadapi kendala serius. Masalahnya antara lain kerusakan lingkungan akibat perluasan kota, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan dampak perubahan iklim yang memperburuk kondisi ekosistem pesisir (Pratiwi et al., 2018). Dengan demikian, pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan berlandaskan ekosistem sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir di masa depan (Afidah et al., 2022).

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini karena kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik yang hayati maupun non-hayati. Sayangnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah ego

sektoral antar lembaga pemerintahan. Ego sektoral ini bahkan telah berujung pada konflik kewenangan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap lembaga merasa berhak memanfaatkannya, namun saling menyalahkan saat terjadi kerusakan.

Pemanfaatan sumber daya pesisir melibatkan beragam penggunaan sosial, berbagai jenis kepemilikan, dan sering kali konflik terkait penggunaannya. Sistem ekologi di wilayah pesisir memiliki keterkaitan erat dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial.

Pengelolaan pesisir dan laut kontemporer mengadopsi pendekatan sosial-ekologi yang menyatukan aspek ekologis dengan nilai-nilai sosial ekonomi. Hafsaridewi et al. (2018) menyatakan bahwa analisis Sistem Ekologi-Sosial (SES) sangat vital dalam pengelolaan pesisir terpadu, karena menyediakan kerangka interdisipliner untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Lebih dari itu, analisis SES menjadi dasar pengetahuan yang esensial untuk memecahkan masalah kompleks pengelolaan pesisir secara sistematis, serta merumuskan strategi berbasis pengetahuan untuk memahami dinamika ekologi dan sosial pada berbagai skala dan dimensi sistem.

Tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan menjadi pemicu konflik antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Ini terjadi karena kepentingan setiap lembaga berakar pada dasar hukum yang diberikan pemerintah, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Undang-Undang (UU).

Wilayah pesisir Kabupaten Sinjai menghadapi sejumlah hambatan dalam pengelolaannya. Hambatan tersebut meliputi kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh ulah manusia yang tak terkendali, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, serta minimnya keterlibatan aktif masyarakat dalam melestarikan sumber daya pesisir. Namun, di balik itu, tersimpan potensi besar yang bisa dimanfaatkan. Pariwisata berbasis alam dan keanekaragaman hayati pesisir yang melimpah dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

2.4.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZM) adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang memandu pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah serta sumber daya pesisir dan laut. Sebagai konsep inti ICZM, pendekatan ini mempertimbangkan seluruh aspek relevan di wilayah pesisir, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan berbagai permasalahan pengelolaan kawasan pesisir yang muncul dapat teratasi secara efektif. Bagian

krusial dari pengelolaan terpadu ini adalah merancang proses kelembagaan yang dapat menciptakan harmonisasi politis (Fabianto & Pieter).

Suatu kegiatan dianggap berkelanjutan bila ekonomis, ekologis, dan sosial-politis juga berkelanjutan. Secara ekonomi, berarti menghasilkan pertumbuhan, memelihara modal, serta efisiensi sumber daya dan investasi. Dari sisi ekologi, berarti menjaga ekosistem, daya dukung lingkungan, dan mengkonservasi sumber daya alam beserta keanekaragamannya. Secara sosial-politik, berarti menciptakan pemerataan, mobilitas sosial, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Fabianto & Pieter, 2014).

2.4.2 Permasalahan dan Potensi Pengelolaan Wilayah Pesisir

Secara tradisional, nelayan di pesisir memanfaatkan sumber daya laut untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pemanfaatan skala besar untuk keuntungan ekonomi masih terbatas, umumnya fokus pada sektor pariwisata di beberapa wilayah. Kini, seiring otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan potensi pesisir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Fabianto & Pieter, 2014).

Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir oleh masyarakat maupun pemerintah daerah seringkali belum memenuhi prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Kondisi ini berdampak negatif pada kelestarian pesisir dan lingkungannya. Degradasi pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang memengaruhi kondisi muara di pesisir. Selain itu, kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan analisis dampak lingkungan di beberapa daerah turut memperburuk ekosistem pesisir. Masalah lain adalah kewenangan perizinan usaha bagi kalangan dunia usaha yang sebagian besar berada di tangan pusat. Terkadang, pemberian izin ini mengabaikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi yang Kurang Jelas: Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memiliki kerangka peraturan perundang-undangan yang spesifik, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang tepat.
2. Pendekatan Sektoral: Pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, yang seringkali menghasilkan kebijakan yang saling tumpang tindih.
3. Kurangnya Perspektif Ekosistem: Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum sepenuhnya mempertimbangkan wilayah pesisir sebagai satu kesatuan ekosistem

yang melampaui batas administratif pemerintahan. Hal ini bisa memicu konflik kepentingan antar daerah.

4. Pemahaman Otonomi Daerah yang Beragam: Para pemangku kepentingan belum memahami secara komprehensif kewenangan daerah dalam konteks otonomi daerah. Akibatnya, muncul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan pesisir di setiap daerah dan sektor (Nengsih, 2020)

Karena pengelolaan kelautan, termasuk wilayah pesisir, masih merupakan kewenangan yang relatif baru bagi pemerintah daerah, pemanfaatan potensi pesisir belum sepenuhnya terealisasi oleh seluruh kabupaten/kota yang berada di pesisir. Artinya, belum semua daerah pesisir mengoptimalkan potensi yang mereka miliki (Fabianto & Pieter, 2014). Kaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi dan social sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan mewajibkan kita untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, melindungi keanekaragaman hayati, dan berupaya memitigasi perubahan iklim serta polusi. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan pelestarian ekosistem.

2. Aspek Ekonomi

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Artinya, keuntungan jangka pendek tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan; dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat juga harus diperhitungkan. Ini berarti menciptakan lapangan kerja yang layak, mengurangi kemiskinan, dan mendorong inovasi yang ramah lingkungan.

3. Aspek Sosial

Dalam pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama. Hal ini meliputi akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.5 Karakteristik Wilayah Pesisir

Karakteristik wilayah pesisir mencakup berbagai aspek mulai dari kondisi fisik, ekosistem hingga sosial ekonomi Masyarakat yang tinggal disana.

Berikut beberapa karakteristik wilayah pesisir:

1. Karakteristik Fisik

a. Topografi

Wilayah pesisir umumnya memiliki topografi yang relative datar atau berombak dengan daratan yang berbasir sebagai ciri khas.

b. Kondisi Geologis

Wilayah ini dipengaruhi oleh proses geologis dari laut dan darat termasuk sedimentasi dan erosi.

c. Kondisi Hedrologis

Wilayah pesisir mengalami pasang surut air laut serta pengaruh angin dan gelombang laut.

d. Ekosistem Pesisir

Terdapat berbagai jenis ekosistem pesisir yang unik seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

2. Karakteristik Ekologis

a. Keanekaragaman Hayati Tinggi

Wilayah pesisir memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna.

b. Sumberdaya Hayati

Pesisir menjadi sumberdaya penting bagi kehidupan laut dan darat termasuk ikan, tumbuhan laut, dan hewan laut lainnya.

c. Keterkaitan Ekosistem

Ekosistem pesisir saling terkait dan membentuk siklus rantai makanan yang kompleks.

3. Karakteristik Sosial Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Masyarakat pesisir umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, atau terlibat dalam kegiatan pariwisata Bahari.

b. Kepadatan Penduduk

Wilayah pesisir sering kali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi terutama di daerah perkotaan.

c. Pola Pemukiman

Pola pemukiman Masyarakat pesisir bisa beragam mulai dari pola liniernyang mengikuti jalan atau garis Pantai hingga pola mengelompok.

d. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan Masyarakat pesisir bias bervariasi dengan Sebagian besar Masyarakat memiliki pendidikan dan pengetahuan tradisional.

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi Masyarakat pesisir bisa beragam namun secara umum Sebagian Masyarakat pesisir berada pada Tingkat kesejahteraan rendah. (Botutihe et al., 2023)

2.6 Dampak Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah zona transisi antara daratan dan lautan yang sangat dinamis Dimana terjadi interaksi antara ekosistem daratan dan laut. Interaksi ini memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan Masyarakat baik positif dan negative.

1. Dampak Positif

a. Peningkatan Ekonomi

Wilayah pesisir mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata dan industri perkapalan.

b. Sumberdaya Alam

Wilayah pesisir kaya akan sumberdaya alam seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, dan terumbu karang yang dapat di manfaatkan secara berkelanjutan.

c. Perlindungan Lingkungan

Ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dapat berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, banjir dan badai.

2. Dampak negative

a. Kerusakan Ekosistem

Aktivitas manusia seperti reklamasi, penambangan, dan polusi dapat merusak ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

b. Pencemaran

Limbah industri dan rumah tangga yang di buang ke laut dapat mencemari perairan pesisir, mengancam kehidupan lain dan Kesehatan manusia.

c. Abrasi dan Banjir

Penebangan hutan mangrove, Pembangunan yang tidak terkendali di pesisir dan perubahan iklim dapat memperparah resiko abrasi dan banjir rob.

d. Berkurangnya Produktivitas Perikanan

Pencemaran dan kerusakan habitat dapat menurunkan produktivitas perikanan yang berdampak pada mata pencaharian nelayan.

e. Konflik Sosial

Pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan konflik antara berbagai kepentingan Masyarakat.

3. Tantangan Pengelolaan

a. Peningkatan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk wilayah pesisir meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya dan ekosistem.

b. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan

Pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat merusak ekosistem pesisir dan mengurangi manfaat yang bisa didapatkan.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut, pemanasan suhu air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem yang dapat mengancam wilayah pesisir. (Tumurung et al., 2018)